

**RENCANA KERJA TAHUNAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
NUSA TENGGARA BARAT
2022**




**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN NUSA TENGGARA BARAT
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2022**

KATA PENGANTAR

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat (BPTP NTB) sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian yang berada di daerah memiliki peran yang semakin besar dalam mendukung pembangunan daerah. BPTP NTB berperan penting dalam menyelaraskan program pembangunan pertanian nasional dengan program pembangunan pertanian daerah dari waktu ke waktu. Dalam upaya tersebut, aspek perencanaan menjadi sangat penting.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) BPTP NTB merupakan dokumen perencanaan yang mengarahkan fokus program dan pelaksanaan kegiatan pengkajian dan pengembangan teknologi spesifik lokasi secara efektif dan efisien dengan produk teknologi yang inovatif dan sesuai kebutuhan nasional dan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam tahun anggaran berjalan. Penyusunan RKT BPTP NTB didasarkan pada Renja BPTP Nusa Tenggara Barat 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Litbang Pertanian dan Kepala BPTP NTB TA. 2022.

RKT BPTP NTB 2022 berisi tentang kondisi umum, kinerja pengkajian teknologi pertanian 2021 dan kinerja yang diharapkan 2022, visi, misi, tujuan dan sasaran, arah kebijakan dan strategi serta standar dan target kinerja 2022. Dokumen RKT ini juga merupakan acuan dan arahan dalam merencanakan dan melaksanakan pengkajian dan diseminasi inovasi teknologi pertanian spesifik lokasi periode 2022 secara menyeluruh, terintegrasi, dan sinergis dengan kegiatan stakeholder di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini, saya ucapkan terima kasih dan semoga dokumen ini dapat dimanfaatkan secara optimal.

Mataram, Januari 2022
Kepala Balai Pengkajian Teknologi
Pertanian Nusa Tenggara Barat,

Dr. Ir. Awaludin Hipi, MSi.
NIP. 19671114 199803 1 001

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	1
II. ORGANISASI.....	2
III. SUMBER DAYA	4
III. KINERJA PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN YANG DIHARAPKAN 2021	13
3.1. Indikator pengukuran keberhasilan.....	13
3.2. Kinerja yang Diharapkan2020-2024	14
3.3. Langkah Operasional.....	15
IV. PENUTUP	24

I. PENDAHULUAN

Inovasi pertanian merupakan komponen kunci dalam pembangunan pertanian, terutama dalam menghadapi kondisi sumberdaya yang semakin terbatas serta perubahan iklim global. Dinamika tersebut, ditambah dengan perubahan lingkungan strategis serta respon terhadap perubahan strategi pembangunan pertanian nasional, menuntut ketersediaan inovasi pertanian yang semakin meningkat. Dengan demikian BPTP NTB sebagai institusi yang mendapatkan tugas untuk melaksanakan pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian, memiliki ruang yang besar untuk berkiprah dalam mendukung pembangunan pertanian.

Merespon tantangan di atas, serta memperhatikan tumbuh kembangnya institusi BPTP NTB, diperlukan arahan untuk lebih memfokuskan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengkajian dan diseminasi teknologi spesifik lokasi, khususnya pada periode tahun 2020-2024. Penyesuaian dan penajaman Renja BPTP NTB 2020-2024 yang merupakan perwujudan dari visi, misi, program dan kegiatan BPTP NTB dalam kegiatan pengkajian dan pengembangan teknologi spesifik lokasi sangat diperlukan untuk sebagai dokumen perencanaan pengkajian dan diseminasi teknologi dan inovasi pertanian spesifik lokasi.

Penajaman dan penyesuaian Renja 2020-2024 ini juga merespon dinamika kebijakan dan prioritas program Balitbangtan dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 Kementan, maka pembangunan pertanian diarahkan untuk dapat menjamin ketahanan pangan dan energi untuk mendukung ketahanan nasional.

Sesuai dengan semangat reformasi dan perubahan birokrasi, setiap UK/UPT dituntut untuk memiliki standar performance sesuai standar mutu dalam pelayanan terhadap masyarakat, mempunyai konsistensi dan komitmen terhadap mutu manajemen dalam pelaksanaan tupoksi dan fungsi organisasi dengan baik. Lebih lanjut, Renja diarahkan demi terlaksananya pemanfaatan sumberdaya spesifik wilayah yang berbasis inovasi dengan kualitas produk pertanian yang optimal dan bernilai tambah, serta bermuara pada tercapainya kesejahteraan petani. Struktur rencana strategis ini, secara komprehensif dijabarkan dalam visi, misi, strategi utama, tujuan, sasaran dan program serta indikator kinerja utama.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir BPTP NTB telah menunjukkan kiprah

nyatanya dalam menghasilkan inovasi pertanian untuk menjawab kebutuhan pengguna. Tidak hanya model-model inovasi teknologi dan pengembangan kelembagaan, namun juga strategi kebijakan dan penyusunan panduan operasional berbagai kegiatan.

Dokumen RKT BPTP NTB ini merupakan dokumen perencanaan yang berisikan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, dan langkah operasional pengkajian dan diseminasi inovasi teknologi pertanian spesifik lokasi yang akan dilaksanakan oleh BPTP NTB pada TA. 2022. Dokumen RKT merupakan acuan dan arahan dalam merencanakan dan melaksanakan pengkajian dan diseminasi inovasi teknologi pertanian spesifik lokasi secara menyeluruh, terintegrasi, dan sinergis baik internal Balitbangtan maupun dengan stakeholder di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

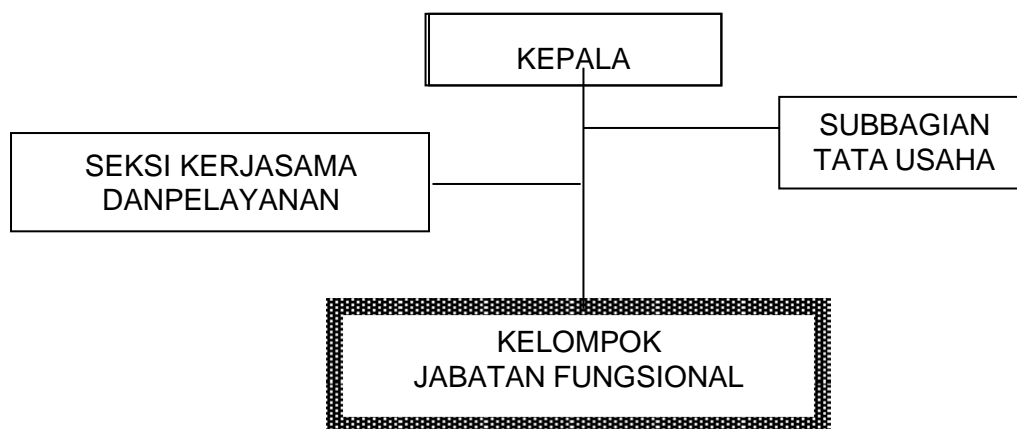
II. ORGANISASI

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.020/5/2017 tanggal 22 Mei 2017, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian, perakitan, pengembangan dan diseminasi teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, BPTP menyelenggarakan fungsi: a) pelaksanaan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi dan laporan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi; b) pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi; c) pelaksanaan penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi; d) pelaksanaan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi; e) perakitan materi penyuluhan dan diseminasi hasil pengkajian teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi; f) pelaksanaan bimbingan teknis materi penyuluhan, dan diseminasi hasil pengkajian teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi; g) penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan, dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi; h) pemberian pelayanan teknik pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi; i) pendampingan penerapan teknologi mendukung pelaksanaan program dan kegiatan strategis pertanian, j) pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan BPTP

2.2. Struktur Organisasi

BPTP dipimpin oleh seorang Kepala Balai setingkat Eselon IIIA, dibantu oleh 2 unit struktural setingkat Eselon IVA, yaitu Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian serta dilengkapi dengan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan Struktur Organisasi seperti terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi BPTP NTB berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.19/Permentan/OT.020/5/2017

Untuk kelancaran pelaksanaan tupoksi dan mengakomodasikan berbagai kegiatan strategis, maka dibentuk unit-unit kelembagaan internal BPTP NTB dengan mengacu pada Keputusan Kepala Badan Litbang Pertanian No.OT.130.95.2003 tanggal 31 Desember 2003, tentang Pembentukan Kelembagaan Internal pada UK/UPT di Lingkungan Badan Litbang Pertanian. Pembentukan unit kelembagaan internal BPTP NTB bertujuan menjabarkan pembagian tugas dan tanggung jawab secara proporsional kepada seluruh pejabat dan staf, sehingga tugas dan fungsi BPTP NTB dapat berjalan lancar dan mencapai kinerja yang optimal. Pada TA. 2022 telah ditetapkan Struktur Organisasi, Personalia serta Uraian Tugas dan Tanggungjawab Personalia BPTP NTB, sesuai dengan SK Kepala BPTP NTB Nomor: 304/OT.040/H.12.17/04/2022 tanggal 04 April 2022, sesuai pada Gambar 2.

Dalam SK tersebut dibentuk Unit Kelembagaan Program dan Evaluasi untuk mengakomodasi dan memfasilitasi pelaksanaan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi dan laporan kinerja BPTP NTB. Unit Kelembagaan Program dan evaluasi dipimpin oleh seorang Koordinator Program dan Evaluasi. Unit kerja Eselon IV dijabarkan lebih lanjut kedalam unit-unit pelaksana dan urusan sesuai dengan fungsi dan urusan. Demikian pula kelembagaan fungsional dibagi kedalam dua bagian yaitu kelompok fungsional peneliti dan fungsional lainnya dan kelompok fungsional penyuluh pertanian dipimpin oleh seorang Ketua Kelompok Fungsional Penyuluh Pertanian.



Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi BPTP NTB TA. 2022

III. SUMBER DAYA

3.1. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, Badan Litbang Pertanian khususnya BPTP NTB berkewajiban melaksanakan kebijakan reformasi birokrasi yang telah diimplementasikan secara nasional baik di lembaga-lembaga pemerintah maupun instansi pemerintah secara berkelanjutan. Pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumberdaya manusia.

Untuk mendukung reformasi birokrasi tersebut, BPTP NTB telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 mulai tanggal 27 September 2010 dan terakhir diperbaharui sesuai standar ISO 9001:2015 pada 26 September 2019. Sesuai dengan semangat reformasi dan perubahan birokrasi setiap UK/UPT dituntut untuk memiliki *standard performance* sesuai standar mutu dalam pelayanan terhadap masyarakat, konsisten dan komitmen terhadap mutu pelayanan dan melaksanakan tugas dan fungsi organisasi dengan baik. Dalam memenuhi hal tersebut, BPTP NTB memerlukan sistem manajemen mutu dalam bidang pelayanan publik untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada *stakeholders*.

Reformasi birokrasi menuntut adanya perubahan kultur dalam bekerja, salah satunya berupa disiplin kehadiran dengan mentaati jam kerja. Pelaksanaan disiplin bagi pegawai negeri sipil mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 3 butir 11 yang menyatakan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib masuk kerja dan mentaati jam kerja.

Secara rinci komitmen Kementerian Pertanian terhadap reformasi dan komitmen terhadap PP 53 tahun 2010 lebih detail disusun dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 06/PERMENTAN/OT.140/1/2010 tanggal 22 Januari 2010 tentang pedoman peningkatan disiplin pegawai. Pada intinya PNS sebagai abdi Negara diharapkan dapat memiliki sikap, tindakan, dan perilaku yang dapat menginisiasi terciptanya budaya kerja yang efisien, hemat, disiplin tinggi dan anti KKN. Dengan budaya kerja yang tinggi dan lingkungan kerja yang kondusif serta sumber daya PNS yang kompeten maka diharapkan dapat memberikan korelasi positif terhadap pelayanan publik yang bersifat acceptable, applicable, dan accountable yang pada akhirnya dapat menciptakan good and clean governance sebagai tujuan akhir dari

reformasi birokrasi. Selain hal tersebut prinsip pengawasan dan pengendalian pelaksanaan dalam Permentan No. 06/PERMENTAN/OT.140/1/2010 menjelaskan tentang sistem pengawasan dan pengendalian internal (obyektif, transparan, institusional), partisipatif (melibatkan berbagai pihak terkait), berorientasi pembinaan (perbaikan sistem, metode, perilaku), mengutamakan pendekatan reward dan punishment yang bersifat edukatif.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) BPTP NTB sampai dengan 31 Desember 2021 sebanyak 93 orang. Pada tahun 2021 terjadi pengurangan PNS sebanyak 5 orang, yaitu Rasiati, Ir. M. Soyan Souri, Moh. Sulaiman, Mujiono dan Dra. Sri Ruspandari dan meninggal dunia karena sakit 1 orang, yaitu Sumerep.

Ditinjau dari tingkat pendidikannya, PNS BPTP NTB berpendidikan mulai SLTP hingga S3. PNS yang berpendidikan S3 sebanyak 9 orang, S2 sebanyak 18 orang, S1 sebanyak 33 orang, D4 sebanyak 2 orang, D3 sebanyak 3 orang, SLTA sebanyak 25 orang, dan SLTP sebanyak 3 orang. Jumlah pegawai yang sedang mengikuti tugas belajar di dalam negeri sebanyak 4 orang, terdiri atas petugas belajar S3 sebanyak 1 orang, dan S2 sebanyak 3 orang. Dari 4 orang petugas belajar tersebut, yang telah menyelesaikan studinya 1 (satu) orang yaitu an. Yurista Sulistyawati, SP, M.Sc. Sedangkan PNS yang mengikuti izin belajar atas biaya sendiri di Universitas Mataram sebanyak 10 (sepuluh) orang, diantaranya yang sudah menyelesaikan studinya sebanyak 2 (dua) orang an. *Yuliana Susanti, SP, M.Si*, dan *Tantawizal, SP, M.Si*. Jumlah PNS yang masih menjalani tugas belajar dan izin belajar sampai dengan 31 Desember 2021 berjumlah 8 (Delapan) orang.

PNS BPTP NTB yang sedang mengikuti tugas belajar S3 an. Awaludin S.Pt, M,Si (Brawijaya). Mengikuti tugas belajar S2 sebanyak 2 orang, yaitu Fitriha Zulhaedar, SP (UGM) dan Yuli Yarwati, SP (Brawijaya). Sedangkan jumlah PNS BPTP NTB yang mengikuti pendidikan S2 dengan izin belajar di Universitas Mataram sebanyak 8 orang, yaitu Eka Widiastuti, SP, Darwis, SP, Mardiana, SP, Yanti Triguna, SP, B. Arie Sudarmayanti, SP, Ria Rustiana, SST, Totok B. Julianto, SPt, Nurul Agustini, SPt.

Perkembangan PNS BPTP NTB berdasarkan pendidikan 5 tahun terakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Perkembangan PNS BPTP NTB berdasarkan pendidikan 5 tahun terakhir (2017 – 2021)

No	Tahun	Pendidikan							Jumlah
		S3	S2	S1	D3/D4	SLTA	SLTP	SD	
1	2017	8	16	40	4	33	5	1	107
2	2018	8	16	38	4	31	4	-	101
3	2019	9	15	36	6	30	4	-	100
4	2020	9	15	38	5	28	4	-	99
5	2021	9	18	33	5	25	3	-	93

Sumber : Data Simprog BPTP NTB

Tabel 1 memperlihatkan bahwa dominasi PNS BPTP NTB berpendidikan S1 dan SLTA, yaitu 35,48% dan 26,88%, disusul S2 (19,35%), S3 (9,68%), D3/D4 (5,38%) dan SLTP (3,23%).

PNS BPTP NTB berdasarkan jabatannya terdiri atas jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum. Jumlah pejabat struktural sebanyak 2 orang terdiri atas Kepala Balai (Eselon IIIa) dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Eselon IVa). Jumlah tenaga fungsional peneliti sebanyak 28 orang, terdiri atas 5 orang Peneliti Pertama, 16 orang Peneliti Muda dan 7 orang Peneliti Madya. Jumlah Penyuluh sebanyak 19 orang, terdiri atas 4 orang Penyuluh Pertanian Pertama, 13 orang Penyuluh Pertanian Muda dan 2 orang Penyuluh Pertanian Madya. Fungsional tertentu lainnya: Pustakawan 1 orang, Arsiparis Pertama 2 orang, teknisi litkayasa 2 orang dan analis keuangan 2 orang. Perkembangan jabatan fungsional tertentu BPTP NTB (2017-2021 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Perkembangan Jabatan Fungsional Tertentu BPTP NTB (2017 – 2021)

No	Jabatan Fungsional	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Peneliti	29	28	27	27	28
2	Penyuluh	20	19	19	19	19
3	Pustakawan	1	1	1	1	1
4	Arsiparis	2	2	2	2	2
5	Litkayasa	1	1	0	2	2
	Total	53	51	49	51	52

Sumber : Data Simprog BPTP NTB

3.2. Sarana dan Prasarana

a. Tanah dan Bangunan

Kantor BPTP NTB dibangun di atas sebidang tanah seluas 2,5 ha berlokasi di Jalan Raya Peninjauan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Tanah ini adalah milik Pemerintah Provinsi NTB dengan status pinjam pakai sesuai Surat Perjanjian antara

Pemerintah Provinsi NTB dengan BPTP NTB, Nomor: 900/1357.a/BPKAD/2016 dan Nomor: 792.1/HK.230/H.12.17/11/2016 tentang Pinjam Pakai Aset/Tanah Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lahan tersebut dipergunakan untuk bangunan kantor, pekarangan, kompleks perumahan pegawai, wisma (mess), laboratorium penyelidikan tanah, gedung unit pengelolaan benih sumber dan kebun percobaan (Tabel 3).

Gedung kantor BPTP NTB dibangun pada tahun 1978 sehingga kondisi gedung kantor yang dimiliki saat ini dirasakan sudah tidak memadai lagi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi institusi maupun untuk kenyamanan pegawai dalam bekerja, baik dari segi luas bangunan maupun kondisi bangunan.

Tabel 3. Keragaan Bangunan BPTP NTB di Narmada Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah (buah)	Luas (m ²)	Kondisi
1.	Gedung Kantor induk	1	584	Baik
2.	Gedung Pelayanan Teknis	1	509	Rusak
3.	GedungPeneliti/ Penyuluh Lantai 2	1	360	Baik
4.	Gedung Perpustakaan	1	160	Baik
5.	Gedung Lab. Penyelidikan Tanah	1	516	Baik
6.	Garasi/Tempat Parkir	6	120	Baik
7.	Gedung Unit Pengelolaan Benih Sumber	1	210	Baik
8.	Rumah Jabatan No.01	1	120	Baik
9.	Wisma Tamu No. 10	1	120	Baik
10.	Wisma Peneliti/Penyuluh Lantai 2	1	360	Baik
11.	Rumah Dinas Type B/120	1	120	Baik
12.	Rumah Dinas Type C/70	7	490	Rusak Berat 3
13.	Rumah Dinas Type D/50	4	200	Baik
14.	Lantai Jemur UPBS	1	200	Baik
15.	Jalan Lingkungan Kantor dan Komplek	1	1,650	Rusak Ringan
16.	Saluran air kantor Induk	1	350	Baik
17.	Pagar keliling Kantor Induk	1	995	Baik
18.	Halaman Kantor Induk BPTP	1	750	Baik
19.	Screen House	1	72	Baik

Guna mendukung pelaksanaan fungsi BPTP NTB dalam hal pelaksanaan penelitian, pengkajian dan diseminasi teknologi, BPTP NTB dilengkapi dengan Kebun Percobaan seluas 71.033 m², berstatus Hak Pakai dengan sertifikat No.5 Tahun 1987 berlokasi di Sandubaya Kecamatan Pringgabaya Lombok Timur. Berdasarkan SK Mentan No.350/Kpts/OT.210/6/2001 status bangunan dan lahan Sandubaya adalah Kebun Percobaan (KP) Sandubaya di bawah pengelolaan BPTP NTB. Di atas tanah tersebut telah dibangun fasilitas KP berupa gedung kantor, perumahan pegawai dan lahan percobaan. Status lahan adalah hak pakai, dengan rincian penggunaan seperti

terlihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Keragaan Tanah dan Bangunan KP. Sandubaya Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah (buah)	Luas (m ²)	Kondisi
1.	Gedung/kantor KP Sandubaya	1	550	Baik
2.	Gedung Laboratorium	1	50	Rusak
3.	Bangunan Gedung Teknisi	1	200	Baik
4.	Gedung Garasi/Pool	1	50	Baik
5.	Rumah Kaca	1	50	Rusak Berat
6.	Wisma Tamu KP. Sandubaya	1	120	Baik
7.	Jalan Lingkungan KP. Sandubaya	1	1,200	Baik
8.	Pagar Keliling KP. Sandubaya	1	2.500	Baik
9.	Halaman KP Sandubaya	1	250	Baik
10.	Rumah Jabatan Kepala Kebun Type B/120	1	120	Rusak Ringan
11.	Rumah Dinas Type C/70	4	210	Rusak Ringan
12.	Rumah Dinas Type D/50	5	250	Baik
13.	Lantai Jemur	1	800	Baik

Perumahan Negara di Kebun Percobaan Sandubaya yang terdiri dari 1(satu) unit Mess kondisi baik, 5 (lima) unit rumah dinas type D/50 (2 unit kondisi rusak ringan) dan 4 (empat) unit type C/70 (2 unit kondisi rusak ringan). Kebun percobaan Sandubaya sudah dilengkapi dengan system irigasi yang cukup memadai berupa bak penampungan air, pompa distribusi, perpipaan dan system irigasi sprinkle. Sampai saat ini dimanfaatkan sebagai visitor plot system usaha tani lahan kering, perbenihan jagung hibrida produk Balitbangtan.

Disamping itu, BPTP NTB memiliki Taman Teknologi Pertanian (TTP) Poto Tano yang berlokasi di Jalan Lintas Poto Tano, Desa Poto Tano, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat. TTP Poto Tano dengan lahan seluas 106.650 m² telah memperoleh Sertifikat Hak Pakai No. 10 tanggal 14 Desember 2021 sesuai SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat No.00027/SKHP/BPN-23.09/XII/2021, tanggal 7 Desember 2021. TTP Poto Tano dilengkapi sarana dan prasarana pendukung, disajikan pada Tabel 5 s/d dan 8.

Tabel 5. Gedung dan Bangunan TTP Poto Tano 2021

No.	Bangunan Gedung	Volume		Kondisi
1	Gapura	1	unit	Baik
2	Gedung Kantor dan Display	124	m2	Baik
3	Asrama	120	m2	Baik
4	Gedung processing Benih	90	m2	Baik
5	Gudang Alsintan	120	m2	Baik
6	Pos Jaga	27	m2	Baik
7	Rumah Jaga	36	m2	Baik
8	Gudang Pengolahan Pakan	54	m2	Baik
9	Kandang Penggemukan Sapi	210	m2	Baik
10	Lantai Jemur	200	m2	Baik
11	Saung Serbaguna	100	m2	Baik
12	Bangsai Pengolahan Hasil	90	m2	Baik

Tabel 6. Jalan, Saluran dan Pagar yang dimiliki TTP Poto Tano 2021

No.	Jalan, saluran dan jaringan	Volume		Kondisi
1	Jalan Lingkungan	1200	m	Baik
2	Saluran air pembuangan	2400	m	Baik
3	Pagar	500	m2	Baik
4	Jaringan air bersih	1	Pkt	Baik
5	Jaringan Listrik	13	Meteran	Baik
6	Gorong gorong	7	Unit	Baik
7	Paving Blok 757 m2	757	m2	Baik

Tabel 7. Peralatan dan mesin untuk mendukung TTP Poto Tano 2021

No.	Peralatan dan mesin	Volume	Kondisi
1	Sprayer Kustang 3WZ4 Kap. 20 ltr.	2 unit	Baik
2	Timbangan Sapi Kenko	2 unit	Baik
3	Kandang Jepit	1 Unit	Baik
4	Timbangan Digital Alexa	2 unit	Baik
5	Pompa Air Honda	1 unit	Baik
6	Oven LPG	1 Pc	Baik
7	Mixer (merk Oxone)	1 set	Baik
8	Penggilingan mie listrik	1 set	Baik
9	Mesin Pencacah Rumput	1 unit	Baik
10	Mesin Pemipil Jagung	1 unit	Rusak
11	Mesin Pembuat Menir	1 unit	Baik
12	Mesin Penepung jagung	1 unit	Baik
13	Mesin Panen Padi	1 unit	Baik
14	Alat Tanam Jagung	4 unit	Baik
15	Mesin Pencacah pakan ternak	1 unit	Baik
16	Scaling machine (siler Injak)	1 unit	Baik
17	Mesin Cultivator	1 unit	Baik
18	Genset	1 unit	Baik
19	Mesin jahit karung	1 unit	Baik
20	Mesin Pemipil benih Jagung	1 unit	Rusak
21	Siller	1 unit	Baik

Tabel 8. Fasilitas kantor mendukung kegiatan TTP Poto Tano 2021

No.	Fasilitas Kantor	Volume	Kondisi
1	Meja Kerja 1/2 Biro	7 buah	Baik
2	Meja Rapat	2 buah	Baik
3	Kursi Rapat Merk Rakuda	3 buah	Baik
4	Kursi Kaisar	50 buah	Baik
5	Kursi Tamu Merk Casarini	2 set	Baik
6	Lemari Besi Merk Lion	2 buah	Baik
7	Tempat Tidur Single	14 set	Rusak
8	Pintu Gerbang	2 Unit	Baik
9	Kulkas 2 Pintu	1 Unit	Baik
10	Antena Parabola	1 Unit	Baik
11	Kipas angin	7 Unit	4 Baik, Rusak 3

b. Sarana Transportasi

Pelaksanaan tugas dan fungsi BPTP NTB, didukung oleh sarana transportasi berupa kendaraan roda 6, roda 4, roda 3 dan roda 2. Jumlah kendaraan roda-6 sebanyak 1 unit berupa truck, 12 unit kendaraan roda-4 berbagai type (penambahan 1 unit mobil Avanza tahun 2019), kendaraan roda-3 sebanyak 9 unit, serta kendaraan

roda-2 (sepeda motor) sebanyak 61 unit (6 unit penambahan dari ACIAR). Dari 61 unit sepeda motor, 5 unit (eks Proyek P4MI) sudah dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan 10 unit kondisi rusak berat telah dilakukan penghapusan melalui proses penjualan secara elektronik dengan perantara KPKNL Mataram. Jumlah kendaraan Roda 2 pada saat ini berjumlah 47 unit dengan kondisi baik sebanyak 31 unit, kondisi rusak berat sebanyak 10 unit, dan kondisi rusak ringan 6 unit (Tabel 9).

Tabel 9. Keragaan kendaraan Roda 6 dan 4 BPTP NTB s/d 31 Desember 2021

No	Merk/Type	Tahun Pembelian	Kondisi
1.	Toyota BY43/ Truck	1997	Baik
2.	Toyota Kijang Standar KF 70 Short	1997	Rusak Ringan
3.	Toyota Kijang KF 80 Standar Long	1999	Rusak Ringan
4.	Mitsubishi Strada	2005	Rusak Berat
5.	Toyota Kijang Innova V Minibus	2007	Baik
6.	Toyota Hilux Double Cabin	2010	Baik
7.	Toyota Hilux Pick Up	2011	Baik
8.	Toyota Kijang Innova Minibus	2016	Baik
9.	Pick Up	2017	Baik
10.	Toyota Hilux Double Cabin	2018	Baik
11.	Hiace	2018	Baik
12.	Toyota Innova	2018	Baik
13.	Toyota Avanza	2019	Baik

Tabel 10. Keragaan Kendaraan Roda 2 BPTP NTB s/d 31 Desember 2021

No	Merk/ Type	Tahun pembelian	Kondisi
1	Yamaha Vega	2004	Rusak ringan
2	Honda Supra	2006	Baik
3	Honda Supra	2006	Baik
4	Suzuki EN 125	2007	Rusak Berat
5	Suzuki EN 125	2007	Rusak Berat
6	Suzuki EN 125	2007	Rusak Berat
7	Suzuki EN 125	2007	Rusak Berat
8	Suzuki EN 125	2007	Rusak Berat
9	Suzuki EN 125	2007	Rusak Berat
10	Suzuki EN 125	2007	Rusak Berat
11	Yamaha RX King	2004	Baik
12	Supra X 125	2009	Baik
13	Suzuki Thunder EN 125	2007	Rusak Berat
14	Suzuki Thunder EN 125	2007	Rusak Berat
15	Suzuki Shogun FL 125 SD	2007	Baik
16	Suzuki Shogun FL 125 SD	2007	Baik
17	Suzuki Shogun FL 125 SD	2007	Baik
18	Suzuki Shogun FL 125 SD	2007	Rusak Berat

19	Honda New Spoke	2011	Baik
20	Honda New Spoke	2011	Baik
21	Honda New Spoke	2011	Baik
22	Honda New Spoke	2011	Baik
23	Honda New CB 150R	2017	Baik
24	Honda New CB 150R	2017	Baik
25	Honda MCB	2001	Rusak Berat
26	Yamaha Sigma	2002	Rusak Berat
27	Honda Vario	2018	Baik
28	Honda Vario	2018	Baik
29	Honda Vario	2018	Baik
30	Honda Vario	2018	Baik
31	Honda Vario	2018	Baik
32	Honda New PCX	2018	Baik
33	Honda New PCX	2018	Baik
34	Honda New PCX	2018	Baik
35	Honda New PCX	2018	Baik
36	Honda New PCX	2018	Baik
37	Honda All New CBR	2018	Baik
38	Honda All New CBR	2018	Baik
39	Honda All New CBR	2018	Baik
40	Honda All New CBR	2018	Baik
41	Honda All New CBR	2018	Baik
42	Supra x 125	2019	Baik
43	Supra x 125	2019	Baik
44	Supra x 125	2019	Baik
45	All new scoopy	2019	Baik
46	All new scoopy	2019	Baik
47	All new scoopy	2019	Baik

Tabel. 11. Keragaan Kendaraan Roda 3 BPTP NTB s/d 31 Desember2021

No.	Merk / Type	Tahun Pembelian	Kondisi
1	Tossa	2012	Baik
2	Tossa	2012	Baik
3	Viar Karya	2013	Baik
4	Viar Karya	2013	Baik
5	Viar	2017	Baik
6	Viar	2017	Baik
7	Viar	2017	Baik
8	Viar	2017	Baik
9	Viar Bit	2017	Baik

c. Sarana Komunikasi

BPTP NTB memiliki 3 line telepon, terdiri atas 1 line faximale, 1 line telpon VPN yang terkoneksi dengan Balitbangtan serta1 line internet, semuanya masih berfungsi dengan baik. Untuk kelancaran komunikasi antar ruangan terdapat 1 set perangkat PABX dengan 32 extension.

3.3. Anggaran

Penggagaran BPTP NTB mengikuti UU no 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, yaitu pendekatan penganggaran terpadu (unified), kerangka pengeluaran jangka menengah (medium term expenditure framework) penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting). Dalam TA. 2022 BPTP NTB mendapatkan alokasi anggaran sejumlah Rp. 17.518.229.000 (Tujuh Belas Miliar lima Ratus Delapan Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang tertuang dalam DIPA No. SP DIPA- 018.09.2.634040/2022, tanggal 17 November 2021 dengan rincian perjenis biaya disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12. Anggaran BPTP NTB per jenis biaya TA. 2022

No.	Jenis Belanja	Anggaran	
		Rp.000	%
1.	Belanja Pegawai	8.214.300	46.89
2.	Belanja Barang:	9.383.929	
	• Non operasional	7.136.929	40.74
	• Operasional Perkantoran	2.067.000	11.79
3.	Belanja Modal	100.000	0.57
	T O T A L	17.518.229	100,00

III. KINERJA PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN YANG DIHARAPKAN 2022

3.1. Indikator Pengukuran Keberhasilan

Indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan capaian kinerja kegiatan yang dilakukan BPTP NTB adalah: masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Indikator pencapaian tujuan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome).

- a. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran (output). Input yang digunakan oleh BPTP NTB meliputi antara lain data sumberdaya manusia (SDM) atau peneliti/penyuluh yang melaksanakan kegiatan serta inovasi teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan pengkajian dan diseminasi teknologi pertanian.
- b. Keluaran (output) adalah produk yang merupakan hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan atau program. Keluaran yang dihasilkan oleh BPTP NTB umumnya berupa program/rencana, informasi/bahan diseminasi, database, paket teknologi, maupun rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan pada stakeholder (Badan Litbang Pertanian, BBP2TP, Lembaga/Instansi terkait dan petani).
- c. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Hasil yang diharapkan dari masing-masing kegiatan BPTP bergantung pada tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing kegiatan tersebut. Hasil kegiatan dan pengkajian serta diseminasi yang dihasilkan oleh BPTP NTB umumnya dirasakan langsung oleh pengambil kebijakan maupun stakeholder lainnya.
- d. Manfaat adalah kegunaan dari suatu keluaran yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat pengguna.
- e. Dampak adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

3.2. Kinerja yang Diharapkan 2020-2024

Untuk mewujudkan BPTP NTB sebagai lembaga pengkajian teknologi pertanian terdepan di wilayah Provinsi NTB, maka BPTP NTB menyusun rencana kinerja 2020-2024 dengan mengacu pada RENSTRA Badan Litbang Pertanian dan BBP2TP, yaitu berdasarkan 9 (sembilan) sasaran strategis disertai indikator kinerja masing-masing (Tabel 13).

Tabel 13. Sasaran strategis, indikator kinerja dan target capaian kinerja 2020-2024

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Satuan (3)	Target				
			2020 (4)	2021 (5)	2022 (6)	2023 (7)	2024 (8)
1. Tersedianya teknologi pertanian spesifik lokasi	Jumlah teknologi spesifik lokasi komoditas strategis	Teknologi	3	3	3	3	3
	Jumlah teknologi spesifik lokasi komoditas lainnya	Teknologi	0	1	1	1	1
2. Tersedianya Model Pengembangan Kawasan Pertanian Sejahtera-Sapira berbasis Bioindustri	Jumlah Model Pengembangan Kawasan Pertanian Sejahtera Berbasis Bioindustri Spesifik Lokasi	Model	1	1	1	1	1
3. Terdiseminasi kannya inovasi teknologi pertanian spesifik lokasi	Jumlah teknologi komoditas strategis yang terdiseminasi ke pengguna	Teknologi	5	3	3	3	3
	Jumlah teknologi komoditas lainnya yang terdiseminasi ke pengguna	Teknologi/ Informasi	0	1	1	1	1
4. Tersedianya benih sumber mendukung sistem perbenihan	Jumlah Produksi Benih Sumber dan benih sebarko moditas strategis	Ton	176,612	150	120	100	100
5. Tersedianya Taman Teknologi Pertanian	Jumlah Kabupaten lokasi TTP	Kabupaten	0	1	1	1	1

6. Dihasilkannya rumusan rekomendasi kebijakan mendukung desentralisasi rencana aksi (Decentralized Action Plan/DAP)	Jumlah rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian wilayah	Rekomendasi	0	1	1	1	1
7. Dihasilkannya layanan operasional serta terciptanya manajemen pengkajian dan pengembangan inovasi pertanian unggul spesifik lokasi	Jumlah layanan internal dan layanan perkantoran	Layanan	6	6	6	6	6
8. Desentralisasi Produksi dan Desiminasi Benih Sumber Varietas Unggul Tanaman Pangan	Sistem Desentralisasi produksi dan distribusi benih varietas unggul baru tanaman pangan	Provinsi	1	1	1	1	1
9. Tersedianya sumberdaya genetik yang terkonservasi dan terdokumentasi	Jumlah akses sumberdaya genetik yang terkonservasi dan terdokumentasi	Akses	5	10	15	15	15

3.3. Langkah Operasional

Sebagai implementasi dari arah kebijakan dan strategi, langkah operasional kegiatan TA. 2022 sebagai berikut:

1. Teknologi komoditas strategis yang terdiseminasi ke pengguna mencakup: (a) peningkatan komunikasi, koordinasi dan diseminasi inovasi pertanian; (b) diseminasi/advokasi inovasi pertanian; (c) pengembangan taman agroinovasi dan agrimart mendukung obor pangan lestari; (d) pendampingan dan pengembangan kawasan pertanian nasional; (e) demfarm VUB Padi Khusus Hasil Inovasi Balitbangtan; dan (f) Perbenihan VUB Padi Hasil Inovasi Badan

Litbang Pertanian di wilayah Dapil Komisi IV DPR RI.

2. Produksi Benih Sumber: Padi, Jagung dan Kedelai
3. Dukungan Manajemen Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian:

(a) Pendayagunaan Hasil Litkaji, Pengelolaan dan Pengembangan Instalasi Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian (IPPTP) Sandubaya, Operasional Laboratorium Tanah dan Pasca Panen dan (b) Pengelolaan Manajemen Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat.

3.4. Standar Kinerja

Program merupakan penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi Kementerian Negara/Lembaga yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi eselon I atau unit Kementerian Negara/Lembaga yang berisi kegiatan untuk mencapai hasil dengan indikator kinerja yang terukur. Balitbangtan sebagai instansi pemerintah menjabarkan program sebagai instrumen kebijakan yang harus dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan, serta memperoleh alokasi pembiayaannya (anggaran). Untuk mewujudkan pencapaian sasaran program yang terukur dapat dilakukan dengan pengerahan sumber daya manusia (SDM), sumber daya material, sumber daya uang (dana/anggaran), atau dengan kombinasi sumber daya tersebut. Program dapat terdiri satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan satu atau beberapa satuan kerja. Dalam istilah perencanaan pada lingkup Kementerian Pertanian pada eselon 2 atau unit kerja dengan eselon dibawahnya. telah disepakati pada level tersebut digunakan istilah aktivitas dalam standar kinerja.

Kinerja BPTP dilihat dari pencapaian sasaran kegiatannya yang diukur dengan Indikator Kinerja Aktivitas (IKA). BPTP Memiliki empat IKA yaitu (1) Jumlah paket teknologi spesifik lokasi yang dimanfaatkan yang didelegasikan menjadi jumlah jejaring dan/atau kerjasama pengkajian teknologi pertanian yang terbentuk serta jumlah paket teknologi spesifik lokasi yang didiseminasikan. (2) Rasio paket teknologi spesifik lokasi yang dihasilkan terhadap jumlah pengkajian teknologi spesifik lokasi yang dilakukan pada tahun berjalan. (3) Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dan (4) Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan publik BPTP. Standar dan target kinerja BPTP NTB disajikan pada Tabel 15.

Tabel 15: Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Capaian Kinerja berdasarkan Perjajian Kinerja Kepala BPTP NTB Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Target Capaian Kinerja Kumulatif Bulanan (%)											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Termanfaatkannya Teknologi dan Inovasi Pertanian Spesifik Lokasi	1. Jumlah Hasil Pengkajian dan Pengembangan Pertanian Spesifik Lokasi yang dimanfaatkan (Kumulatif 5 tahun terakhir)(jumlah)	27	10	20	35	45	55	65	75	80	90	100	100	100
		2. Persentase hasil Kegiatan Pengkajian Dan Pengembangan Pertanian Spesifik Lokasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan (%)	100	0	0	25	30	40	50	50	60	75	80	100	100
2.	Terwujudnya Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang efektif dan efisien dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat (nilai)	79	10	20	30	40	50	60	70	75	80	85	90	100
3.	Terkelolanya Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat (berdasarkan regulasi yang berlaku)(nilai)	90	10	20	30	40	50	60	70	75	80	85	90	100

IV. PENUTUP

RKT Balai Pengkajian Teknologi Pertanian NTB tahun 2022 merupakan penjabaran dan implementasi Renja BPTP NTB 2021-2022. RKT ini juga dimaksudkan sebagai Rencana Aksi kegiatan pengkajian dan diseminasi teknologi inovasi pertanian spesifik lokasi yang menjabarkan dinamika lingkungan strategis dan isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran kegiatan pengkajian inovasi pertanian untuk TA.2022.

RKT ini dilengkapi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta target pencapaian sasaran sehingga akuntabilitas kegiatan pengkajian dapat dievaluasi dengan baik. RKT ini dapat ditelaah setiap ada perubahan DIPA maupun kebijakan dalam tahun yang sedang berjalan sehingga memungkinkan untuk terjadi perubahan atau penyesuaian, misalnya pada indikator kinerja yang disesuaikan dengan kebijakan dan dinamika pembangunan pertanian khususnya penelitian/pengkajian. Pada akhirnya RKT ini ditujukan sebagai acuan dalam melaksanakan perencanaan pengkajian teknologi spesifik lokasi di BPTP Nusa Tenggara Barat TA. 2022.